

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses sinkronisasi antara regulasi dana desa dengan kebutuhan lokal di Desa Tegalurung berlangsung dilakukan secara partisipatif melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Proses sinkronisasi merupakan sebuah peristiwa yang dinamis, di mana pemerintah desa berperan sebagai jembatan antara kebutuhan penataan regulasi dana desa dari pemerintah pusat dan mengintegrasikannya dengan aspirasi warga desa. Sinkronisasi di Tegalurung membuktikan bahwa dana desa dapat dioptimalkan untuk mengakomodasi inklusivitas suara kelompok rentan dan kebutuhan infrastruktur lingkungan skala kecil berbasis aspirasi warga seperti pengadaan paralon dan grobak sampah.
2. Implementasi program pemberdayaan di Desa Tegalurung terbagi ke dalam dua pola; pemberdayaan langsung dan pemberdayaan tidak langsung. Pola pemberdayaan langsung diimplementasikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya agar warga memiliki daya saing berkelanjutan, salah satunya program pelatihan manajemen keuangan UMKM dan keterampilan teknis bentuk aktivitas untuk mentransformasi warga menjadi pelaku pembangunan yang mandiri. Pola pemberdayaan tidak langsung adalah bentuk aktivitas pembangunan fisik-infrastruktur (betonisasi, irigasi, dan stimulan material), berfungsi fasilitasi mobilitas yang warga untuk menjamin kelancaran distribusi hasil produksi buruh tani, nelayan dan jenis ekonomi masyarakat lainnya.
3. Hasil kegiatan pemberdayaan menunjukkan capaian yang signifikan pada aspek output, yakni meningkatnya aksesibilitas antarblok, lancarnya sarana irigasi, serta tercapainya indikator kesehatan gizi balita yang baik. Namun, kualitas hasil tersebut belum sepenuhnya menyentuh transformasi outcome berupa kemandirian ekonomi yang luas. Kualitas perencanaan (sinkronisasi) yang baik terbukti berkorelasi positif terhadap ketepatan

sasaran program sarana pendukung, namun tantangan besar masih tersisa pada upaya mengubah fenomena kemiskinan 919 buruh tani. Keberhasilan fisik saat ini merupakan pondasi penting, namun kemandirian desa masih memerlukan pergeseran fokus dari sekadar penyediaan sarana menuju pemberdayaan keterampilan produktif yang berkelanjutan.



B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Desa Tegalurung: perlu dilakukan re-orientasi pembangunan dengan meningkatkan alokasi anggaran pada pola pemberdayaan langsung. Fokus ke depan harus digeser dari "infrastruktur beton" menuju "infrastruktur otak" melalui pelatihan *skill* teknis bagi kelompok miskin dan pelaku UMKM agar mampu mengoptimalkan fasilitas fisik yang sudah dibangun.
2. Bagi masyarakat (kelompok akar rumput): Masyarakat diharapkan mulai meningkatkan literasi perencanaan pembangunan dengan mengusulkan program-program yang bersifat peningkatan kapasitas diri dan keahlian tangan, sehingga partisipasi dalam musrenbang tidak hanya terjebak pada usulan perbaikan jalan.

Bagi peneliti selanjutnya: mengingat penelitian ini menemukan adanya dua sisi antara regulasi pusat dan aspirasi lokal, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai model otonomi desa dalam menentukan skala prioritas mandiri di tengah kepungan kebijakan nasional yang bersifat instruktif.